

INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Aniek Hindrayani^{*)}

Abstract

Foreign Direct Investment flows have become a major part of capital flows in the world economy. Through FDI, the economy has been transformed from agricultural and exploitation of raw materials into producers and exporters of manufactured goods. There are several factors affecting economic growth of a country. In Indonesia, FDI is one of the factors that had positive relationship with economic growth.

Inefficient beaureaucracy and bad infrastructure are still the major problem affecting FDI inflows in Indonesia. Government has develops strategy to raise the FDI inflows which were create rules and regulations and infrastructure build-up.

Keywords : *Foreign Direct Investment, Economic Growth, Development Strategies*

FDI

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan di luar wilayah negaranya sendiri. Pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan ini dapat terjadi pada manajemen, joint venture, transfer teknologi, dan transfer tenaga ahli. FDI dapat pula terjadi manakala pebisnis melakukan investasi pada fasilitas atau memasarkan produk di luar negeri. FDI merupakan salah satu ciri penting dari system ekonomi global. FDI bermula pada saat perusahaan dari satu Negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di Negara lain. Proses penanaman modal dilakukan dengan

cara perusahaan yang berada di Negara asal (*home country*) mengendalikan perusahaan yang berada di Negara tujuan investasi (*host country*) baik pada sebagian perusahaan maupun pada keseluruhan bagian perusahaan. Caranya adalah dengan membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada, maupun menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di luar negeri, atau membeli saham sekurang-kurangnya 10%. Cara lain adalah dengan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan yang tidak saling berhubungan. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan partisipasi dalam kepemilikan ekuitas

melalui joint venture dengan investor lain atau perusahaan lain.

FDI mengukur kepemilikan pihak asing terhadap investasi asset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Bentuk lain dari investasi langsung adalah penanaman kembali modal (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya. Perkembangan munculnya bentuk lain dari FDI diantaranya adalah pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi.

Sebagian besar FDI merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk didalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh bersama (*joint-ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan local. Joint venture melibatkan tiga pihak atau lebih, biasanya disebut sindikasi (*syndicates*) dan biasanya dibentuk untuk menjalankan proyek tertentu

seperti konstruksi dalam skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumber daya.

Hampir seluruh Negara, khususnya Negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing merupakan suatu hal yang amat penting guna mendukung pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu, kehadiran investor asing sangat membatu perkembangan suatu Negara. Undang-undang penanaman modal asing di Indonesia (UU PMA No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investor asing guna membangun ekonomi nasional. Ijin atas persetujuan atas investasi langsung luar negeri merupakan tanggung jawab dan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kestabilan kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum suatu Negara merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menginvestasikan dananya ke Negara lain.

Perusahaan multinasional yang ingin menarik sumber daya alam, baik yang sudah ada dan menguntungkan, maupun yang baru muncul, dan menekan biaya produksi

dengan mempekerjakan buruh dengan biaya murah di Negara berkembang. Hal ini biasa dilakukan oleh investor asing sebagai bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dananya ke luar negeri. Misalnya, perusahaan-perusahaan pertambangan di Kanada yang membuka perusahaan tambang di Indonesia atau perusahaan minyak sawit yang berada di Malaysia mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Cargill, Exxon, BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto, dan Freeport McMoRan, serta INCO semuanya memiliki investasi langsung di Indonesia.

Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal asing dapat mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting terhadap manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dengan investasi tidak langsung atau portofolio, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan local tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. FDI merupakan komitmen jangka panjang, sehingga bagi suatu Negara sering kali dianggap lebih berharga jika dibandingkan dengan jenis investasi lain yang dapat ditarik

begitu saja ketika muncul tanda adanya permasalahan.

TUJUAN FDI

Penanaman modal memberikan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, melainkan juga bagi perekonomian suatu Negara tempat modal tersebut ditanamkan, serta bagi Negara asal investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal asing dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal asing dengan modal nasional. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Seringkali, suatu Negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Berbagai strategi untuk mengundang investor asing ke Indonesia seperti yang telah didukung dengan arah kebijakan ekonomi dalam Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 kedalam salah satu kebijakan ekonomi adalah “mengoptimalkan peranan

pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan public, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang”.

Kebijakan mengundang investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa. Oleh karena itu, usaha-usaha di bidang tertentu diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain, yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Di lain pihak, banyak pula yang menentang adanya FDI. Mereka yang menentang FDI mencatat bahwa FDI memberi makna lain pada ungkapan *think globally, act locally*. Pendapat mereka adalah bahwa FDI lebih menguntungkan Negara asal dari mana investasi itu ditanamkan daripada Negara tuan rumah sebagai

tujuan dimana investasi itu ditanamkan. Konglomerat-konglomerat multinasional dapat menggunakan kekuasaan mereka yang besar terhadap sector-sektor ekonomi yang lebih kecil dan lebih lemah. Investor asing dikhawatirkan dapat menghabisi kompetisi lokal.

FDI dapat membuat perusahaan manufaktur yang lebih besar, meningkatkan kapasitas produksi totalnya seringkali dengan biaya yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara asalnya. FDI dapat membawa produk yang dihasilkan ke pasar-pasar luar negeri yang letaknya lebih dekat; membuka kantor-kantor penjualan local di Negara tuan rumah; berkelit dari berbagai hambatan dagang “*trade barriers*” dan menghindari tekanan pemerintah luar negeri pada produksi lokal.

Salah satu kemungkinan lain yang dapat mempengaruhi investasi asing adalah dengan mendorong investasi etis atau investasi yang bertanggung jawab secara social. Investasi yang bertanggungjawab social ini sering kali disebut *Social Responsible Investment* (SRI). Meskipun pola investasi ini belum menjadi isu yang utama di sebuah Negara, namun pasar SRI telah

meningkat secara berarti. Di Negara Inggris, SRI telah mencapai £ 7,1 milyar. Di Amerika Serikat, skema investasi etis telah mencapai US\$153 milyar menjelang tahun 2000.

FDI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sector ekonomi dan dapat kategorikan sebagai berikut :

- Sebagai individu
- Sekelompok individu yang bergabung/ berhubungan
- Perusahaan berbadan hukum maupun perusahaan bukan berbadan hukum
- Perusahaan public atau perusahaan pribadi
- Sekelompok usaha sentra industri
- Pemerintahan
- Lembaga hukum, perseroan, atau organisasi sosial
- Atau berbagai kombinasi dari kriteria di atas.

HUBUNGAN FDI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Cina menunjukkan bahwa kehadiran FDI memberi banyak hal positif terhadap perekonomian Negara tuan rumah. Di Indonesia, bukti paling nyata adalah pada masa

pergantian antara Orde Lama dengan Orde Baru. Indonesia bangkit kembali setelah kehadiran FDI sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama periode 1980-an. Tentu banyak factor lain yang juga berperan sebagai sumber pendorong pertumbuhan tersebut seperti bantuan atau utang luar negeri dan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional saat itu yang tercerminkan ke dalam repelita dan stabiitas politik dan social.

Menurut data statistic United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD), jumlah total arus masuk FDI di Indonesia pada tahun 1996 adalah \$6.194 milyar, berturut-turut pada tahun 1997 adalah \$4.678 milyar, pada tahun 2000 sebesar \$0.145, dan pada tahun 2004 sebesar \$1.023 milyar. Pertumbuhan ekonomi pada masa akhir tahun 2004 sebesar 5-6%, dan pada paruh pertama tahun 2005 kenaikan FDI menjadi sebesar 70%. Pada awal tahun tersebut Negara Inggris, Jepang, Cina, Hongkong, Singapura, Australia, dan Malaysia adalah sumber FDI yang dianggap penting.

Peningkatan FDI dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi global. Aliran dana investasi langsung luar negeri terbesar terjadi diantara Negara-negara industry yaitu Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Akan

tetapi perkembangan aliran dana investasi langsung luar negeri juga terjadi peningkatan pada Negara-negara non industry. Berikut ini adalah aliran dana investasi langsung luar negeri di Amerika Serikat :

Table 1. Aliran dana investasi langsung luar negeri di Amerika Serikat

Periode	FDI Outflow (juta)	FDI Inflow (juta)	Net
1960 – 1969	\$ 42.18	\$ 5.13	+ \$ 37.04
1970 – 1979	\$ 122.72	\$ 40.79	+ \$ 81.93
1980 – 1989	\$ 206.27	\$ 329.23	- \$ 122.96
1990 – 1999	\$ 950.47	\$ 907.34	+ \$ 43.13
2000 – 2007	\$ 1,629.05	\$ 1,421.31	+ \$ 207.74
Jumlah	\$ 2,950.69	\$ 2,703.81	+ \$ 246.88

Sumber : <http://wikipedia.org/wiki/fdi>

Amerika Serikat merupakan Negara terbesar penerima FDI. Lebih dari \$325.3 juta FDI dialirkan pada tahun 2008, meningkat 37% dari tahun sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh adalah pada enam tahun terakhir lebih dari 4000 proyek baru dan 630.000 pekerjaan baru dihasilkan oleh perusahaan asing, hasil ini setara dengan \$314 juta investasi. Tidak dapat disangkal bahwa Amerika merupakan Negara yang memiliki sejarah pembayaran gaji dari perusahaan asing lebih tinggi jika dibandingkan dengan

perusahaan dalam negeri. Peningkatan ekspor dilakukan melalui jaringan distribusi multinasional. FDI telah menghasilkan 30% dari pekerjaan penduduk Amerika sebagai pekerja di sector manufaktur. Perusahaan asing telah menghabiskan dananya sebesar \$34 juta untuk keperluan riset dan pengembangan pada tahun 2006, dan terus dilakukan secara kontinyu untuk mendukung banyak proyek nasional. FDI telah berkembang meningkatkan produktivitasnya melalui peningkatan

jumlah modal, yang berarti meningkatkan standar hidup.

FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam decade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak Negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industry. Berkembangnya system teknologi informasi serta komunikasi global yang semakin murah memungkinkan manajemen investasi asing dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah.

Selain Amerika, Cina merupakan Negara terbesar bagi FDI. Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan konglomerat-konglomerat masih menjadi bagian dari FDI (sumber : UNCTAD). Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina kini telah menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik sebagai tuan rumah FDI dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan

pesat. Dana bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (*Overseas Development Assistance*) yang dulu sebagai sumber utama dana pembangunan di banyak negara berkembang, kini hanya tinggal setengah dari jumlah sebelum tahun 1990-an. Pembiayaan swasta melalui FDI telah menjadi sumber terbesar dalam dana pembangunan. Peningkatan FDI ini adalah akibat dari pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan transnasional dalam ekonomi global. Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari Negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara perusahaan-perusahaan *subsidi* (cabang) beroperasi di Negara-negara berkembang.

PERKEMBANGAN FDI DI INDONESIA

Perkembangan FDI di Indonesia melalui beberapa tahapan. UU Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan Orde Baru mengatakan bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pada pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa bidang usaha yang bernilai strategis bagi Negara dan kehidupan sehari-hari bagi rakyat banyak, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak asing. Bidang

usaha tersebut adalah pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, kereta api, tenaga nuklir, dan media masa.

Setahun kemudian, UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968) dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan : “Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional”. Dengan kata lain, pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1) yang menjamin investor asing dapat memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang “ ... pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, kereta api; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa.

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengadakan International Infrastructure Summit pada tanggal 17 Januari dan BUMN summit pada

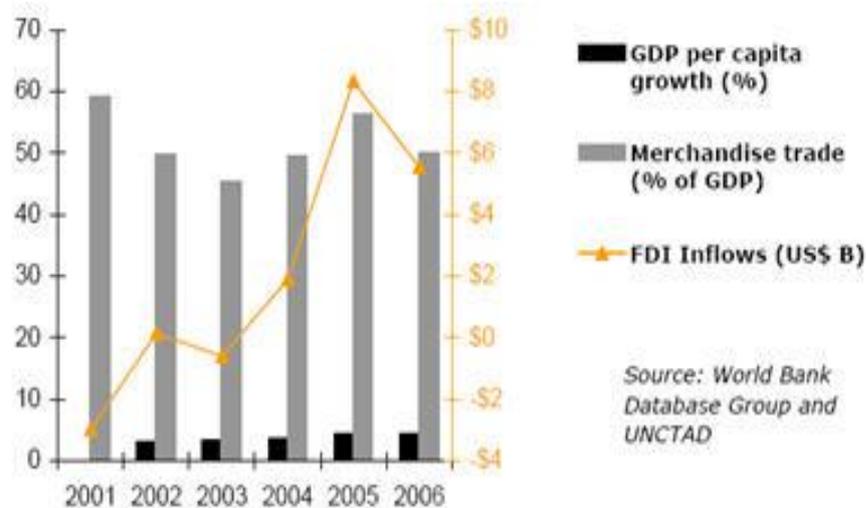
tanggal 25-26 Januari. Infrastruktur summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar perusahaan. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

BUMN summit menyatakan dengan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sector privat. Dengan kata lain, artinya tidak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Pada masa depan, seluruh barang dan jasa bagi public akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediannya murni karena motif untuk mendapatkan keuntungan.

Pemerintah sangat memperhatikan FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari Negara lain mempunyai pengaruh yang signifikan. FDI merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi

nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi Negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. FDI mendorong pembangunan karena bagi Negara tuan rumah atau perusahaan local yang menerima investasi, FDI menjadi sumber

tumbuhnya teknologi, proses, produk system organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah, dan akses kepada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.



Grafik 1. Hubungan antara FDI, GDP, dan Perdagangan

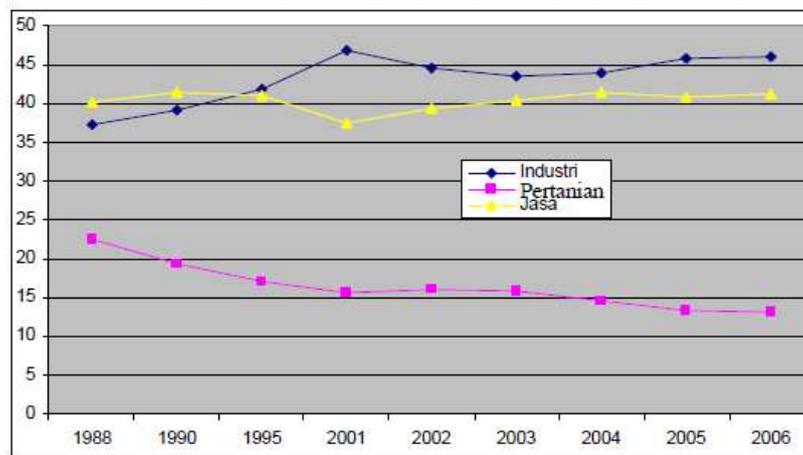
Berdasar grafik 1, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 pada aliran FDI dan perdagangan, meskipun pada tahun 2003 terjadi sedikit penurunan. GDP dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, jika dihitung dalam persentase, angkanya sekitar 7% - 8%. Bahkan sampai pada tahun

2008, angka pertumbuhan FDI di Indonesia hanya mencapai 10%.

Perkembangan sector industry manufaktur menjadi sangat pesat yang didorong oleh terjadinya perubahan ekonomi secara structural dari sebuah ekonom berbasis pertanian ke sebuah ekonomi berbasis industry. Pada tahun 1988, pangsa sector industry terhadap pembentukan PDB tercatat sekitar

37%, namun sejak tahun 1997 telah melewati 40%. FDI sangat berperan dalam perkembangan ekspor non-migas, khususnya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan

manufaktur. Sampai dengan tahun 2006, peran perubahan struktur ekonomi industry telah melampaui 45%, seperti digambarkan pada grafik 2 berikut :



Sumber: database ADB.

Grafik 2. Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Penelitian telah dilakukan terhadap perkembangan arus FDI ke Indonesia menurut struktur dan polanya dari sudut negara pemasok modal, menurut sektor-sektornya dalam perekonomian dan menurut distribusinya antarprovinsi di Indonesia. Juga dianalisis mengenai pengaruh secara indikatif dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap FDI tersebut dalam perkembangan arus modalnya ke Indonesia, ditemukan bahwa pada tahun 1998 akibat pengaruh krisis moneter, jumlahnya telah merosot sekali sehingga pada tahun itu

berjumlah negatif. Berbagai usaha dan kebijakan yang telah diambil sejak tahun itu ternyata belum dapat mendongkrak kembali jumlah FDI yang mengalir masuk ke Indonesia.

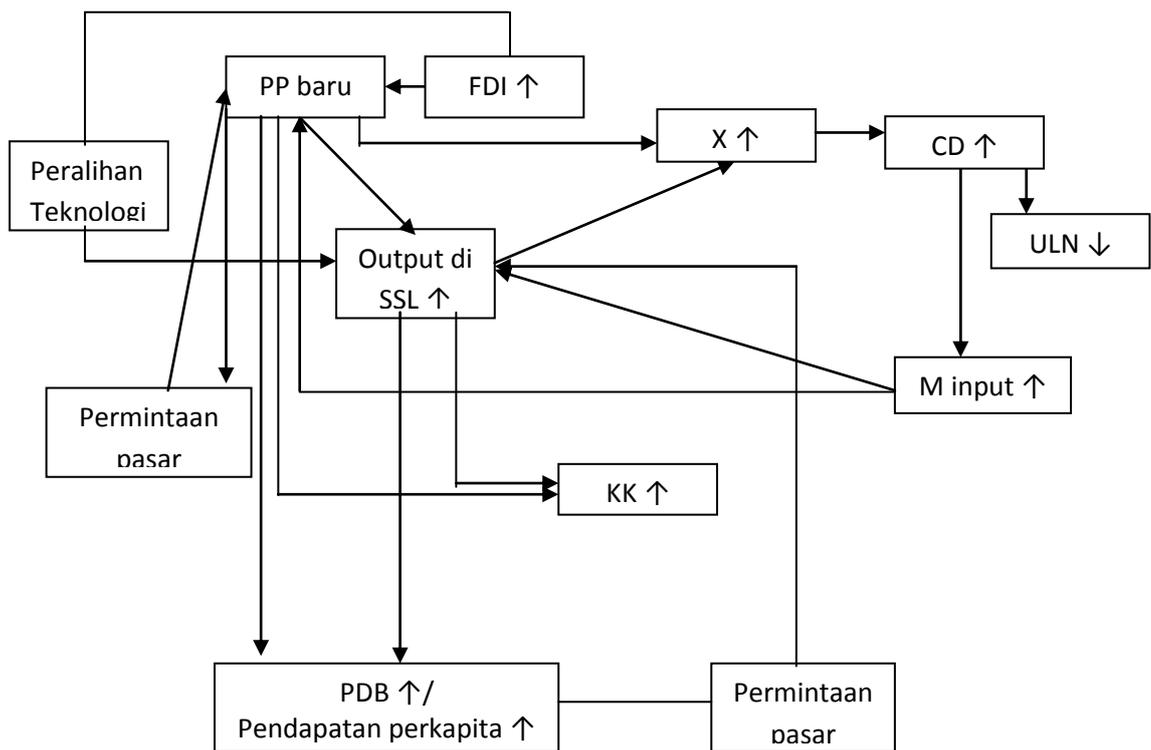
Ternyata permasalahan pokoknya tidak lagi semata-mata dari segi ekonomi dan moneter, tapi lebih banyak menyangkut segi-segi lain yang bersifat sistemik, seperti: ketimpangan kehidupan social ekonomi, gejolak kerusuhan sosial dan keamanan, ketidak pastian hukum dan masih merajalelanya korupsi, tingginya country risk, isu perburuhan yang merepotkan,

sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap aspek tersebut.

Penelitian oleh Pusat Studi dan UKM Universitas Trisakti bekerjasama dengan Kadin Indonesia (2006) menemukan efek yang positif dan signifikan dari FDI terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum, dan pertumbuhan sector industry lebih dari 40%. Indeks kinerja arus masuk FDI dan indeks potensi arus masuk FDI

menunjukkan Indonesia pada urutan kedua di tingkat Asean (UNTCAD, 2006, 2007 dalam Tulus Tambunan, 2007).

Secara teori, FDI berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di Negara tuan rumah melalui beberapa jalur. Efek positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Efek positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari gambar 1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, pengaruh positif FDI terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi melalui

pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) berarti pula terhadap penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini merupakan suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari Negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M).

Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut : adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sector-sector lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sector-sector domestic lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan FDI terhadap output agregat di Negara penerima. Dengan kata lain, semakin besar

komponen M dari sebuah proyek FDI, atau semakin besar “kebocoran” dari keterkaitan produksi antara FDI dengan ekonomi domestic, semakin kecil efek penggandaan tersebut.

Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestic lewat sisi permintaan : peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat, dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sector-sector domestic sepenuhnya terserap. Sebaliknya jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya FDI, maka terjadi deficit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran FDI member lebih banyak dampak negative daripada dampak positif terhadap Negara tuan rumah.

Keempat, peran FDI sebagai sumber penting peralihan teknologi

dan knowledge lainnya. Peran ini dapat melalui dua jalur utama, yaitu pertama, melalui pekerja-pekerja local yang bekerja di perusahaan-perusahaan FDI. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestic, maka mereka membawa pengetahuan dan teknologi serta keahlian baru dari perusahaan FDI ke perusahaan domestic. Kedua, melalui keterkaitan produksi atau subcontracting antara FDI dengan perusahaan-perusahaan local, termasuk usaha kecil dan menengah, seperti kasus PT. Astra Internasional dengan banyak subkontraktor skala kecil dan menengah.

UU PM No.25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak, dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sector-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek yang ditinjau dalam UU ini diharapkan memiliki dampak positif terhadap perkembangan investasi di Indonesia.

Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum : pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan nonperijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. System ini dikenal dengan system pelayanan satu atap, diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat.

Kedua, Bab III Pasal 4 No. 2b, mengenai kebijakan dasar penanaman modal : menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan keamanan dari gangguan kriminalitas dan hokum yang pasti yang dapat melindungi hak-hak dari pelaku bisnis dalam berbagai transaksi termasuk jual beli tanah

dan sengketa bisnis sangat membantu calon investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Beberapa Undang-undang dan peraturan yang berpengaruh

terhadap efektifitas UU PM No. 25 tahun 2007 dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 2. UU/Peraturan yang berpengaruh terhadap efektifitas UU PM No. 25 tahun 2007

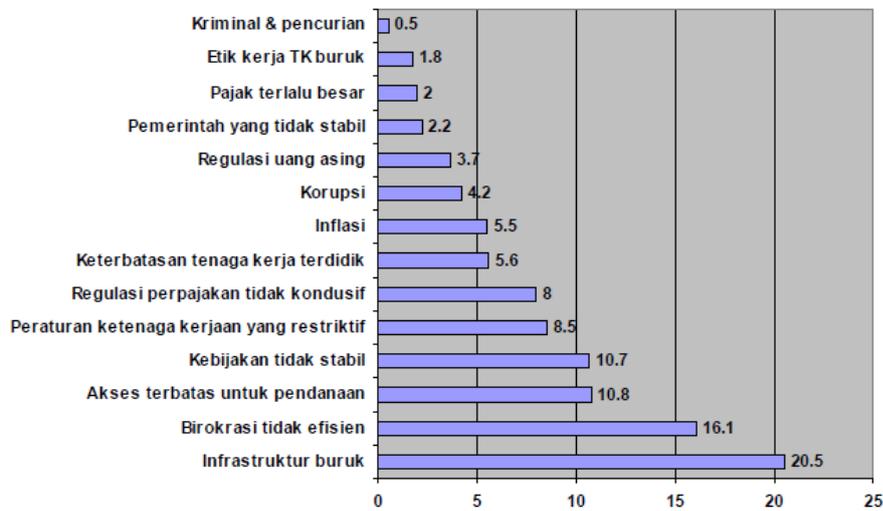
UU/Peraturan	Tahun	Isu
Peraturan Mendag 37/M-DAG/Per/9	2007	Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Peraturan Mendag 36/M-DAG/Per/9	2007	Penerbitan SIUP
UU No. 40	2007	
UU No. 39	2007	Perseroan Terbatas
UU No. 17	2006	Cukai
UU No. 2	2005	Kepabeanaan
UU No. 13	2003	Penyelesaian Hubungan Industrial
UU No. 22	2001	Ketenagakerjaan Investasi di sector migas

Sumber : Tambunan, 2007

KENDALA-KENDALA

Hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan di 131 negara dari *World Economic Forum* (2007) untuk *The Global Competitiveness Report 2007-2008* memperlihatkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pengusaha-pengusaha di Indonesia, seperti infrastruktur yang buruk dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Saat ini, 67 persen saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 50 persen bank umum, dan 85,4 persen ladang minyak dan gas dikuasai pemodal luar negeri.

Buruknya infrastruktur akan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing harga, dengan konsekuensi ekspor menurun. Konsekuensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing (FDI) untuk membuka usaha di dalam negeri, sehingga hal ini akan berpengaruh negative pada produksi dan ekspor di dalam negeri. Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia tahun 2007-2008 dapat digambarkan pada grafik berikut :



Grafik 3. Masalah-masalah dalam melakukan bisnis di Indonesia

Infrastruktur buruk, menduduki urutan pertama permasalahan bisnis di Indonesia. Permasalahan birokrasi sepertinya sudah menjadi suatu permasalahan klasik yang sulit untuk dihapus. Problem ini juga dialami oleh banyak Negara lain di Asia. Kasus di Indonesia, citra buruk ini tidak lain adalah pada mahalanya lisensi atau persetujuan. Banyak pejabat senior pemerintah terjun ke dunia bisnis atau menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadi.

Rofyanto Kurniawan (2003) meneliti FDI dan strategi perkembangannya di Indonesia menemukan bahwa aliran FDI seharusnya tidak hanya terfokus pada factor makro ekonomi, tetapi juga pada mikroekonomi dan lingkungan. Ditemukan hubungan positif antara FDI, pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri dan populasi penduduk, sehingga FDI memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan ini dicerminkan ke dalam persamaan berikut :

$$Y = G(K, F, L, t)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

K = Modal Dalam Negeri

F = Modal Luar Negeri

L = Jumlah Populasi

t = Waktu

Melalui penelitian empiris dengan menggunakan regresi linear, dihasilkan model matematis berikut :

$$YG = \alpha + \beta(DI/Y) + \gamma(FDI/Y) + \lambda POPG$$

Dimana :

YG = growth rate of GDP

DI/Y = gross domestic investment in GDP

FDI/Y = foreign direct investment in GDP

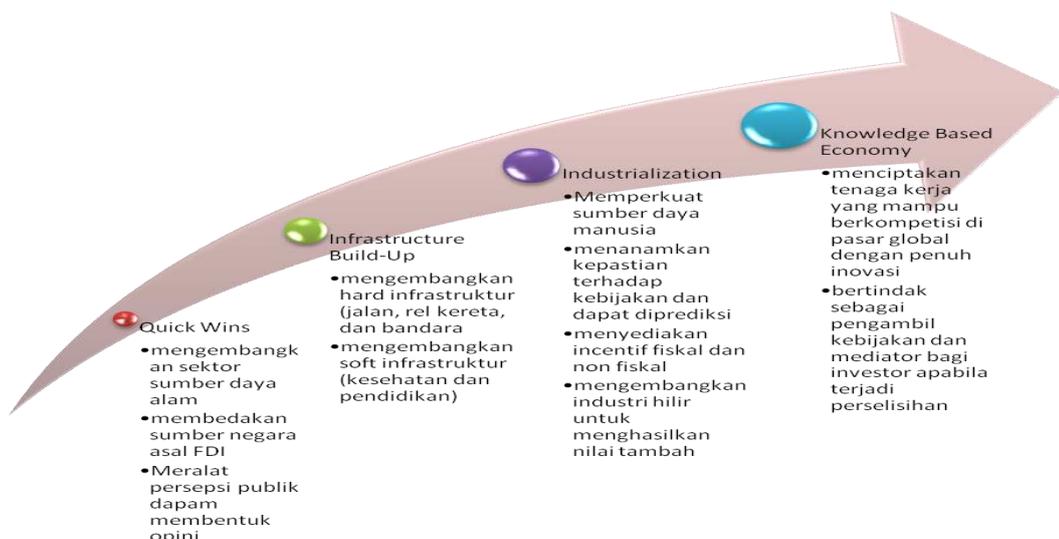
POPG = growth rate population.

SOLUSI

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang pertama adalah dengan mengeluarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Hal kedua adalah melakukan koordinasi dengan baik antara pemodal dengan BKPM serta antar departemen yang terkait.

Ketiga adalah menyederhanakan proses perijinan penanaman modal di daerah, yaitu dengan menyelenggarakan perijinan satu atap sesuai dengan undang-undang.

Pemerintah, aparat hukum, dan komponen masyarakat dituntut untuk segera menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Strategi FDI tahun 2010 digambarkan kedalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 3. FDI Development Strategy 2010

KESIMPULAN

Investasi memang sangat penting sebagai motor utama perkembangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Walaupun perkembangan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah juga penting, akan tetapi tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak dapat tercapai. Namun demikian harus diakui bahwa FDI, khususnya di Negara-negara maju tetap menjadi prioritas dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri, terutama untuk Negara berkembang seperti Indonesia karena tiga alasan utama. Pertama, FDI membawa teknologi baru dan pengetahuan lainnya yang berguna bagi pembangunan di dalam negeri. Kedua, pada umumnya FDI mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di Indonesia. Ketiga, perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang berorientasi ekspor, biasanya sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam ekspor.

Pada akhirnya, bahwa maksud diadakannya FDI adalah sebagai pelengkap atau penunjang

pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan Negara harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu, pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan pada FDI agar tidak menimbulkan sifat ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://bkpm.go.id>. *FDI Strategy Paper 2010*. BKPM Jakarta
- <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>. *Factsheet Down to Earth : Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*. Diunduh tanggal 24 Agustus 2010.
- <http://id.shvoong.com/business.management>. *Foreign direct Investment*. Diunduh tanggal 3 September 2010.
- <http://intl.feedfury.com>. Tujuan Penanaman Modal Asing. Diunduh tanggal 24 Agustus 2010.
- Kurniawan, Rofyanto. 2003. *Foreign direct Investment and development Strategies in Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 1, No. 1, September 2003. Hal. 43 – 70
- Rustian. 2003. Penanaman Modal Asing di Indonesia : analisis Perkembangan, Pola dan Upaya Pengembangannya. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Tambunan, Tulus. 2007. Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing : Makalah disampaikan pada Seminar Bank Indonesia, Rabu, 19 Desember 2007.